



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN**

LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019
Audited

Jl. Veteran III No.2
Jakarta 10110

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

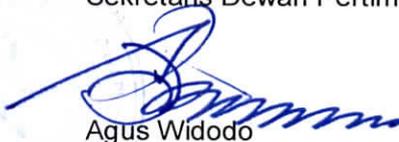
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2019 ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan mencari solusi terbaik guna mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 yang lebih berkualitas. Disamping itu Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden serta memberikan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 14 April 2020

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,



Agus Widodo

NIP 196808141995031007

DAFTAR ISI

Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2019 Audited

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum.....	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran ...	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	26
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	30
F. Pengungkapan Penting Lainnya	32
VI. Lampiran.....	33



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3866850

Situs: www.wantimpres.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 14 April 2020

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,

Agus Widodo

NIP 196808141995031007

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7.993.400,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 (netto) adalah sebesar Rp35.499.053.963,00 atau mencapai 97,53 persen dari alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp36.396.300.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.662.766.832,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp722.224.846,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp940.541.986,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp7.573.635,00 dan Rp1.655.193.197,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp35.508.775.842,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(35.508.775.842,00). Kegiatan Non Operasional defisit sebesar Rp(5.484.717,00) dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(35.514.260.559,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp1.678.393.193,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(35.514.260.559,00) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp35.491.060.563,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp1.655.193.197,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2019 Audited

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019		% thd ANGG	TA 2018 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	7.993.400,00	-	100.500,00
JUMLAH PENDAPATAN		-	7.993.400,00	-	100.500,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	3.373.317.000,00	2.946.628.632,00	87,35	3.380.485.112,00
Belanja Barang	B.4	32.284.890.000,00	31.817.191.431,00	98,55	34.885.104.440,00
Belanja Modal	B.5	738.093.000,00	735.233.900,00	99,61	125.633.500,00
JUMLAH BELANJA		36.396.300.000,00	35.499.053.963,00	97,53	38.391.223.052,00

II. NERACA

Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2019 Audited

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN NERACA PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1		
Persediaan	C.2	722.224.846,00	794.753.903,00
Jumlah Aset Lancar		722.224.846,00	794.753.903,00
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.3	12.603.129.333,00	11.867.895.433,00
Aset Tetap Lainnya	C.4	1.900.000,00	1.900.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.5	(11.664.487.347,00)	(11.063.307.543,00)
Jumlah Aset Tetap		940.541.986,00	806.487.890,00
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.6	665.905.900,00	665.905.900,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.7	(665.905.900,00)	(585.142.775,00)
Jumlah Aset Lainnya		-	80.763.125,00
JUMLAH ASET		1.662.766.832,00	1.682.004.918,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.8	7.573.635,00	3.611.725,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		7.573.635,00	3.611.725,00
JUMLAH KEWAJIBAN		7.573.635,00	3.611.725,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.9	1.655.193.197,00	1.678.393.193,00
Jumlah Ekuitas		1.655.193.197,00	1.678.393.193,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.662.766.832,00	1.682.004.918,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2019 Audited

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL	0.1		
PENDAPATAN	0.2		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	0.3	2.946.628.632,00	3.380.485.112,00
Beban Persediaan	0.4	2.140.309.189,00	2.146.257.148,00
Beban Barang dan Jasa	0.5	20.341.503.878,00	23.332.518.166,00
Beban Pemeliharaan	0.6	2.516.659.728,00	2.062.257.350,00
Beban Perjalanan Dinas	0.7	6.881.731.486,00	7.296.489.838,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0.8	681.942.929,00	918.213.769,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-
JUMLAH BEBAN		35.508.775.842,00	39.136.221.383,00
SURPLUS (DEFSIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(35.508.775.842,00)	(39.136.221.383,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.9		
SURPLUS PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		23.800.237,00	23.177.344,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		29.284.954,00	9.490.815,00
Jumlah Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(5.484.717,00)	13.686.529,00
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(5.484.717,00)	13.686.529,00
SURPLUS (DEFSIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(35.514.260.559,00)	(39.122.534.854,00)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBP			
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Persediaan			
SURPLUS/DEFSIT LI		(35.514.260.559,00)	(39.122.534.854,00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2019 Audited

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	1.678.393.193,00	2.409.806.496,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(35.514.260.559,00)	(39.122.534.854,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHANKEBIJAKAN/ KESALAHAN KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.		
PENYESUAIAN NILAI ASET			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN			
SELISIH REVALUASI ASET TETAP			
KPREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI			
KOREKSI LAIN-LAIN			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	35.491.060.553,00	38.391.122.552,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(23.199.996,00)	(731.412.302,00)
EKUITAS AKHIR	E.6	1.655.193.197,00	1.678.393.193,00

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Berkedudukan di Jalan Veteran III No.2 Jakarta, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah "Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pemberian nasehat dan pertimbangan kepada Presiden".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
2. Memberikan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, ditetapkan tujuan strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut:

“Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sekretariat Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan

Presiden adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban

atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi jangka pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bias diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap sesuai dengan PMK No. 181/PMK.06/2016 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk:
 1. peralatan dan mesin; atau
 2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
 - b) sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
 1. gedung dan bangunan; atau
 2. aset tetap renovasi gedung dan bangunan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau diunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat AsetTetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	-	7.993.400,00
Jumlah Pendapatan	-	7.993.400,00
Belanja		
Belanja Pegawai	3.373.317.000,00	3.373.317.000,00
Belanja Barang	32.942.482.000,00	32.284.890.000,00
Belanja Modal	80.501.000,00	738.093.000,00
Jumlah Belanja	36.396.300.000,00	36.396.300.000,00

*Realisasi
Pendapatan
Rp7.993.400,00*

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.993.400,00. Pendapatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden diperoleh dari Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019

Uraian	TA 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pengelolaan BMN			
Pendapatan dari Pemindah tangan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Lain-lain			
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	7.993.400,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	-	-
Jumlah	-	7.993.400,00	-

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan	7.993.400,00	100.500,00	7.853,63
Jumlah	7.993.400,00	100.500,00	7.853,63

Pendapatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden TA 2019 mengalami penurunan dari pendapatan TH 2018 sebesar 7.853,63%. Penerimaan pendapatan TH 2019 berasal dari pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu.

*Realisasi Belanja
Negara
Rp35.499.053.963,00*

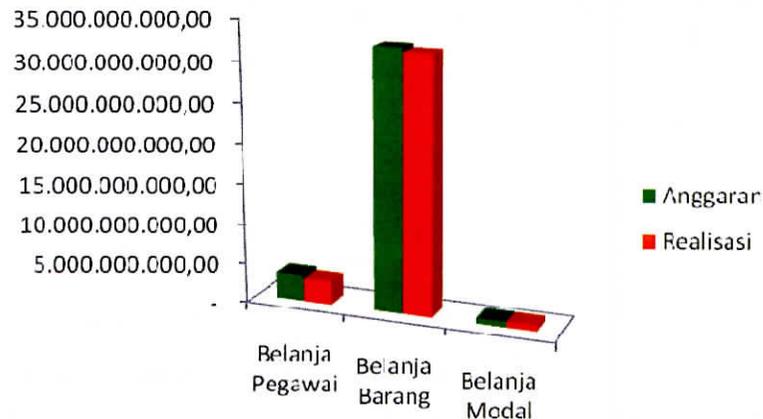
B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2019 adalah sebesar Rp35.499.053.963,00 atau 97,53% dari anggaran belanja sebesar Rp36.396.300.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.373.317.000,00	2.946.628.632,00	87,35
Belanja Barang	32.284.890.000,00	31.842.820.975,00	98,63
Belanja Modal	738.093.000,00	735.233.900,00	99,61
Total Belanja Kotor	36.396.300.000,00	35.524.683.507,00	97,61
Pengembalian Belanja	-	25.629.544,00	
Jumlah	36.396.300.000,00	35.499.053.963,00	97,53

Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja



Dibandingkan dengan TA 2018, realisasi belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar 7,53%. Hal ini disebabkan berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2014-2019 pada bulan Oktober 2019 sehingga ada kekosongan jabatan selama dua bulan.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.946.628.632,00	3.380.485.112,00	(12,83)
Belanja Barang	31.817.191.431,00	34.885.104.440,00	(8,79)
Belanja Modal	735.233.900,00	125.633.500,00	485,22

Belanja Pegawai
Rp2.946.628.632,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.946.628.632,00 dan Rp3.380.485.112,00. Realisasi belanja pegawai TA 2019 mengalami penurunan sebesar 12,83% dari TA 2018. Hal ini disebabkan berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2014-2019 pada bulan Oktober 2019 sehingga tidak ada pembayaran gaji Anggota Dewan Pertimbangan Presiden selama dua bulan.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	2.442.997.632,00	2.959.203.112,00	(17,44)
Belanja Lembur	33.073.000,00	14.534.000,00	127,56
Belanja Uang Makan PNS	470.558.000,00	406.748.000,00	15,69
Jumlah Belanja Kotor	2.946.628.632,00	3.380.485.112,00	(12,83)
Pengembalian Belanja Pegawai			
Jumlah Belanja	2.946.628.632,00	3.380.485.112,00	(12,83)

Belanja Barang
Rp31.817.191.431,00

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 31.817.191.431,00 dan Rp34.885.104.440,00. Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar 8,79% dari Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan disebabkan berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2014-2019 pada bulan Oktober 2019 sehingga tidak ada kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden selama dua bulan.

Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	15.701.123.854,00	18.625.734.115,00	(15,70)
Belanja Barang Non Operasional	1.209.618.228,00	662.670.000,00	82,54
Belanja Persediaan	2.257.946.259,00	2.402.749.720,00	(6,03)
Belanja Jasa	3.427.356.143,00	4.027.289.043,00	(14,90)
Belanja Pemeliharaan	2.339.971.718,00	1.870.525.410,00	25,10
Belanja Perjalanan	6.906.804.773,00	7.296.489.838,00	(5,34)
Jumlah Belanja Kotor	31.842.820.975,00	34.885.458.126,00	(8,72)
Pengembalian Belanja	(25.629.544,00)	(353.686,00)	7.146,41
Jumlah Belanja	31.817.191.431,00	34.885.104.440,00	(8,79)

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp735.233.900,00*

B.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp735.233.900,00 dan Rp125.633.500,00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 485,22% dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 karena dilakukan penggantian peralatan kantor yang sudah rusak dan penggantian furniture ruang kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	498.780.700,00	85.430.000,00	483,85
Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	232.053.200,00	36.603.500,00	533,96
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	4.400.000,00	-	-
Alat Persenjataan	-	3.600.000,00	(100,00)
Jumlah Belanja	735.233.900,00	125.633.500,00	485,22

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00*

C.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

JENIS	TAHUN 2019	TAHUN 2018
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp722.224.846,00*

C.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp722.224.846,00 dan Rp794.753.903,00.

Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TA 2019	TA 2018
Barang Konsumsi	474.645.332,00	545.616.579,00
Bahan untuk Pemeliharaan	225.759.714,00	222.658.349,00
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	9.704.800,00	9.380.025,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	9.667.800,00	13.752.350,00
Persediaan Lainnya	2.447.200,00	3.348.600,00
Jumlah	722.224.846,00	794.753.903,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp12.603.129.333,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp12.603.129.333,00 dan Rp11.867.895.433,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	11.867.895.433,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	735.233.900,00
Saldo per 31 Desember 2019	12.603.129.333,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(11.664.487.347,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	938.641.986,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian komputer unit senilai Rp498.780.700,00;
- Pembelian alat kantor dan rumah tangga senilai Rp232.053.200,00;
- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar senilai Rp4.400.000,00.

Besaran realisasi belanja modal sebesar Rp735.233.900,00 telah membentuk aset berupa aset tetap sebesar Rp735.233.900,00.

Aset Tetap Lainnya
Rp1.900.000,00

C.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp1.900.000,00 dan Rp1.900.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2019 tidak terdapat mutasi tambah atau pun kurang atas Aset Tetap Lainnya.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(11.664.487.347,00)

C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp(11.664.487.347,00) dan Rp(11.063.307.543,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	12.603.129.333,00	11.664.487.347,00	938.641.986,00
Akumulasi Penyusutan		12.603.129.333,00	11.664.487.347,00	938.641.986,00

Aset Tak Berwujud
Rp665.905.900,00

C.6. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp665.905.900,00 dan Rp665.905.900,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi terhadap Aset Tak Berwujud (ATB) selama periode TA 2019.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	665.905.900,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2019	665.905.900,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(665.905.900,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0,00

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud	
Uraian	Nilai
<i>Software</i>	665.905.900,00
Jumlah	665.905.900,00

*Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp665.905.900,00*

C.7. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp665.905.900,00 dan Rp585.142.775,00. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset lainnya yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Software	665.905.900,00	665.905.900,00	-
Akumulasi Penyusutan		665.905.900,00	665.905.900,00	-

*Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp7.573.635,00*

C.8. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp7.573.635,00 dan Rp3.611.725,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang sebesar Rp7.573.635,00 merupakan tagihan telepon pemakaian bulan Desember 2019 sebesar Rp2.903.635,00 dan tagihan langganan TV Kabel pemakaian bulan Desember 2019 Rp4.670.000,00.

*Ekuitas
Rp1.655.193.197,00*

C.9. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.655.193.197,00 dan Rp1.678.393.193,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional
Rp35.508.775.842,00*

D.1. Kegiatan Operasional

Defisit dari kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp35.508.775.842,00 dan Rp39.136.221.383,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara pendapatan sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp35.508.775.842,00.

Rincian Kegiatan Operasional TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(5.484.717,00)	13.686.529,00	(140,07)
Pendapatan dari Kegiatan Operasional	0,00	0,00	-
Beban dari Kegiatan Operasional	35.508.775.842,00	39.136.221.383,00	(9,27)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(35.508.775.842,00)	(39.136.221.383,00)	(9,27)

*Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Rp0,00*

D.2. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

*Beban Pegawai
Rp2.946.628.632,00*

D.3. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.946.628.632,00 dan Rp3.380.485.112,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2019 dan TA 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	2.442.997.632,00	2.959.203.112,00	(17,44)
Beban Lembur	33.073.000,00	14.534.000,00	127,56
Beban Uang Makan PNS	470.558.000,00	406.748.000,00	15,69
Jumlah	2.946.628.632,00	3.380.485.112,00	(12,83)

Beban Persediaan
Rp2.140.309.189,00

D.4. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.140.309.189,00 dan Rp2.146.257.148,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan TA 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.603.217.704,00	1.600.192.917,00	0,19
Beban Persediaan pita cukai, materai, dan leges	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	438.371.335,00	441.066.190,00	(0,61)
Beban Persediaan untuk tujuan strategis	89.757.750,00	92.176.641,00	(2,62)
Beban Persediaan Lainnya	8.962.400,00	12.821.400,00	(30,10)
Jumlah Beban Persediaan	2.140.309.189,00	2.146.257.148,00	(0,28)

Beban Barang dan Jasa
Rp20.341.503.878,00

D.5. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp20.341.503.878,00 dan Rp23.332.518.166,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2019 dan TA 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	5.333.004.354,00	5.478.154.770,00	(2,65)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30.479.500,00	26.484.342,00	15,08
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	283.750.000,00	286.590.000,00	(0,99)
Beban Barang Operasional Lainnya	10.058.560.000,00	12.834.605.503,00	(21,63)
Belanja Bahan	402.238.228,00	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	807.380.000,00	662.670.000,00	21,84
Beban Langganan Telepon	45.414.656,00	65.032.799,00	(30,17)
Beban Sewa	2.624.213.397,00	3.041.206.438,00	(13,71)
Beban Jasa Profesi	757.020.000,00	918.900.000,00	(17,62)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	19.228.000,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	20.342.060.135,00	23.332.871.852,00	(12,82)
Pengembalian Belanja	(556.257,00)	(353.686,00)	57,27
Jumlah	20.341.503.878,00	23.332.518.166,00	(12,82)

**Beban
Pemeliharaan**
Rp2.516.659.728,00

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.516.659.728,00 dan Rp2.062.257.350,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2019 dan TA 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.633.934.506,00	1.460.522.861,00	11,87
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	283.041.212,00	214.406.549,00	32,01
Beban Pemeliharaan Lainnya	422.996.000,00	195.596.000,00	116,26
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	176.688.010,00	189.851.940,00	(6,93)
Beban Persediaan Suku Cadang	-	1.880.000,00	(100,00)
Jumlah	2.516.659.728,00	2.062.257.350,00	22,03

**Beban Perjalanan
Dinas**
Rp6.881.731.486,00

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.881.731.486,00 dan Rp7.296.489.838,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan TA 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	4.259.846.559,00	4.892.831.829,00	(12,94)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	110.550.000,00	117.750.000,00	(6,11)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	205.986.359,00	73.336.574,00	180,88
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	814.998.907,00	765.836.334,00	6,42
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.515.422.948,00	1.446.735.101,00	4,75
Jumlah Belanja Kotor	6.906.804.773,00	7.296.489.838,00	(5,34)
Pengembalian Belanja	(25.073.287,00)	-	-
Jumlah	6.881.731.486	7.296.489.838	(5,68)

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp681.942.929,00*

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp681.942.929,00 dan Rp918.213.769,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2019 dan TA 2018

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TAHUN 2019	TAHUN 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	601.179.804,00	753.089.794,00	(20,17)
Jumlah Penyusutan	601.179.804,00	753.089.794,00	(20,17)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	80.763.125,00	165.123.975,00	(51,09)
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	80.763.125,00	165.123.975,00	(51,09)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	681.942.929,00	918.213.769,00	(25,73)

*Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Rp(5.484.717,00)*

D.9. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(5.484.717,00)	13.686.529,00	(140,07)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	23.800.237,00	23.177.344,00	2,69
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	29.284.954,00	9.490.815,00	208,56
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(5.484.717,00)	13.686.529,00	(140,07)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp1.678.393.193,00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.678.393.193,00 dan Rp2.409.805.495,00.

*Defisit LO
Rp(35.514.260.559,00)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(35.514.260.559,00) dan Rp(39.122.534.854,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp0,00*

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp35.491.060.563,00*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp35.491.060.563,00 dan Rp38.391.122.552,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas TA 2019

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(7.993.400,00)
Ditagihkan ke Entitas Lain	35.499.053.963,00
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	35.491.060.563,00

Penurunan Ekuitas
Rp(23.199.996,00)

E.5. Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Penurunan Ekuitas 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp(23.199.996,00) dan Rp(731.412.302,00).

Ekuitas Akhir
Rp1.655.193.197,00

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir tanggal 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.655.193.197,00 dan Rp1.678.393.193,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. REKENING PEMERINTAH

Bagian Anggaran 007.07 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dikelola melalui rekening bank atas nama BPG 018 Dewan Pertimbangan Presiden pada BNI Cabang Harmoni KK Setneg dengan nomor rekening 0126909150. Dana Operasional Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2019 dikelola melalui rekening bank atas nama BPP 018 Dewan Pertimbangan Presiden pada BNI Cabang Harmoni KK Setneg dengan nomor rekening 0371244922.

F.2. PENGUNGKAPAN LAINNYA

Berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 199 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 54 Tahun 2019 tanggal 1 Februari 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, pejabat perbendaharaan negara Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Agus Widodo
Pejabat Pembuat Komitmen	: Hangga Filardikh Bakhtiar
Pejabat Penandatanganan SPM	: Uup Supendi
Bendahara Pengeluaran	: Sugeng Widodo

Lampiran A1

**Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019**

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny.		Beban Peny.		Akm. Peny.		Nilai Buku Per 31-12-2019
				Per 31-12-2018	Per 31-12-2019	Tahun 2019	Per 31-12-2019			
B	Peralatan dan Mesin									
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	399.881.000	399.881.000	0	0	399.881.000	0	0	
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	20.107.113	20.107.113	0	0	20.107.113	0	0	
3	Alat Bengkel Bermesin	10	8.674.700	7.786.005	462.170	462.170	8.248.175	426.525	426.525	
4	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	5.844.300	3.265.680	1.168.860	1.168.860	4.434.540	1.409.760	1.409.760	
5	Alat Ukur	5	2.131.500	2.131.500	0	0	2.131.500	0	0	
6	Alat Kantor	5	1.984.646.675	1.865.294.947	66.229.651	66.229.651	1.931.524.598	53.122.077	53.122.077	
7	Alat Rumah Tangga	5	3.406.350.525	2.867.866.526	216.314.805	216.314.805	3.084.181.331	322.169.194	322.169.194	
8	Alat Studio	5	254.825.353	239.425.936	7.504.723	7.504.723	246.930.659	7.894.694	7.894.694	
9	Alat Komunikasi	5	366.354.491	365.048.891	870.400	870.400	365.919.291	435.200	435.200	
10	Alat Kedokteran	5	1.093.750	1.093.750	0	0	1.093.750	0	0	
11	Persenjataan Non Senjata Api	3	10.173.816	7.173.816	1.200.000	1.200.000	8.373.816	1.800.000	1.800.000	
12	Alat Khusus Kepolisian	4	36.518.181	31.953.408	4.564.773	4.564.773	36.518.181	0	0	
13	Komputer Unit	4	3.493.396.798	3.016.258.172	95.884.001	95.884.001	3.112.142.173	381.254.625	381.254.625	
14	Peralatan Komputer	4	2.441.907.331	2.158.451.555	190.436.014	190.436.014	2.348.887.569	93.019.762	93.019.762	
15	Alat SAR	2	10.650.000	10.650.000	0	0	10.650.000	0	0	
16	Alat Kerja Penerbangan	10	136.400.000	47.740.000	13.640.000	13.640.000	61.380.000	75.020.000	75.020.000	
17	Unit Peralatan Proses Produksi	8	21.643.800	18.094.959	2.542.978	2.542.978	20.637.937	1.005.863	1.005.863	
18	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7	2.530.000	1.084.284	361.429	361.429	1.445.713	1.084.287	1.084.287	
	Total		12.603.129.333	11.063.307.542	601.179.804	601.179.804	11.664.487.346	938.641.987	938.641.987	